

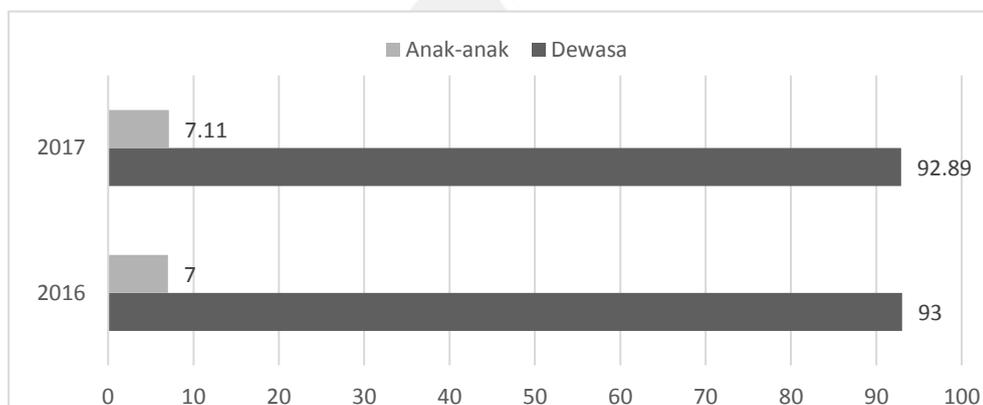
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

Anak merupakan kelompok masyarakat yang belum berusia 18 tahun (UU RI No. 23 tahun 2002), anak merupakan generasi penerus yang potensial sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, perhatian terhadap anak sebenarnya sudah jauh-jauh hari seperti Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Berbagai aturan terus bergulir untuk saling melengkapi atau merinci Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk untuk mengimplementasikan cita-cita awal melindungi generasi penerus, kecemasan ini wajar dengan melihat statistik kriminal 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 persentase penduduk Indonesia yang menjadi korban kejahatan 1.08 persen dari total jumlah penduduk dan karakteristik penduduk korban berdasarkan kelompok usia tahun 2016 – 2017, menunjukkan kelompok usia anak-anak menduduki 7,11 persen yang berarti 201.184 anak menjadi korban dan memiliki tren peningkatan

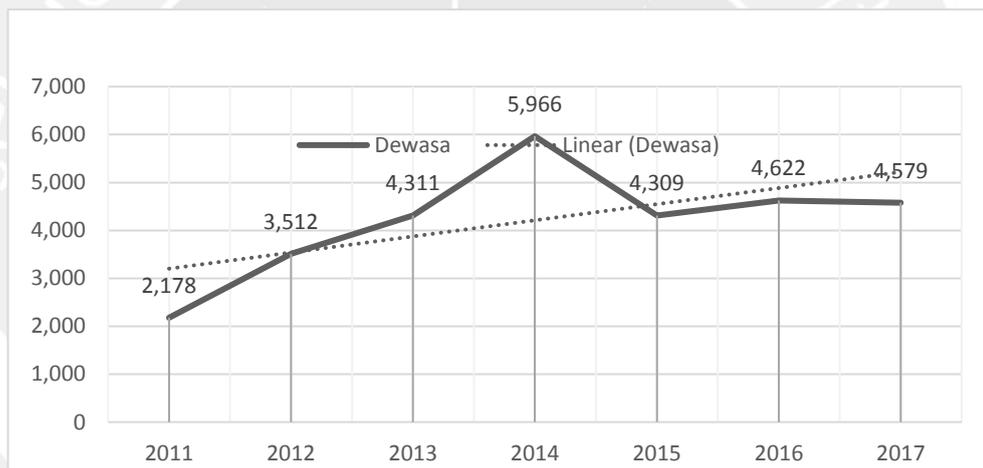
Gambar 1. 1
Karakteristik Penduduk
Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber : *Badan Pusat Statistik Susenas 2017 dan 2018*

Dari angka tersebut 76.56 persen memilih tidak melapor ke kepolisian, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terjadi beberapa kali tren kasus pengaduan anak, selama jangka waktu tahun 2011 – 2017 terjadi beberapa kali kenaikan dan penurunan, tetapi secara rata-rata terus mengalami peningkatan, pengaduan ini terdiri anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kekerasan, eksploitasi dan pornografi, tren ini akan terus meningkat apabila tidak ada langkah strategis dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam mengatasi permasalahan, hal itulah kemudian melahirkan payung hukum pemenuhan hak anak.

Gambar 1. 2
Tren Total per Tahun Kasus Pengaduan Anak



Sumber : Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI

Pemerintah dalam hal ini diwakilkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Permen No. 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, dengan tujuan membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota, merujuk dari Permen PPPA tersebut, Pemerintah dalam hal ini Bupati Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati No. 12 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak, untuk mendorong terbentuknya gugus tugas, yaitu lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk

mewujudkan KLA. Pengukuran kabupaten layak dilakukan dengan mengacu pada Permen PPPA No. 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten layak anak, dari 31 “ Indikator Pemenuhan Hak Anak “ 6 indikator mendukung tersedianya ruang kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah, yang dapat diakses semua orang, fasilitas informasi layak anak, pojok asi, kawasan tanpa rokok serta pos konsultasi bagi orang tua maupun anak, menurut Badan Pusat Statistik proyeksi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2015 – 2025 kelompok umur 0 – 19 tahun di kabupaten Sleman mengalami peningkatan secara konstan hal ini mengindikasikan peningkatan kebutuhan ruang publik yang masih terus tumbuh.

Gambar 1. 3
 Proyeksi Penduduk
 Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur



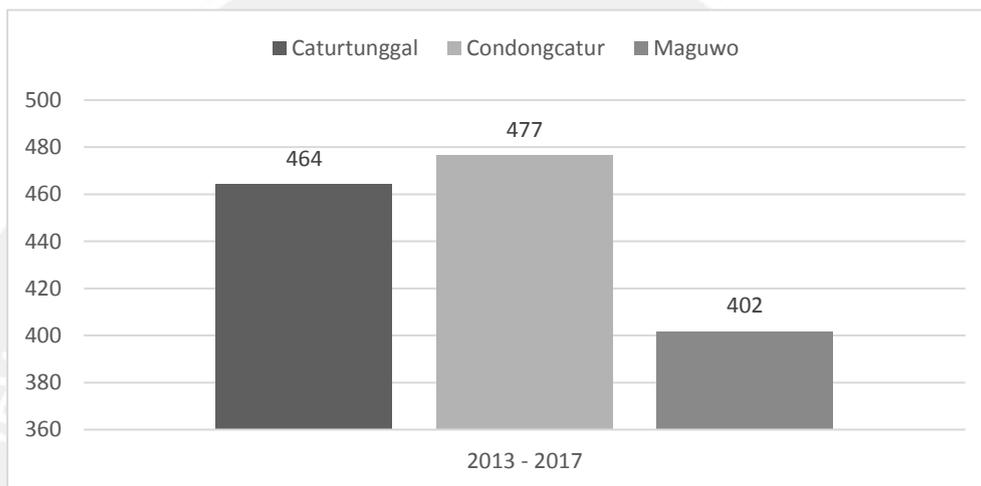
Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta*

Segaris dengan itu pemerintah Sleman mendorong terciptanya Ruang Bermain Anak (RBA), hal ini terlihat dari rencana aksi daerah 2017 – 2021 dengan keluaran yang diinginkan adanya ruang ramah anak di setiap desa, tetapi pemerataan masih sangat kurang hal ini terlihat dari jumlah taman yang mendapat predikat ruang bermain ramah anak 2018 oleh kementerian PPPA yang berjumlah satu, taman Dengung di kabupaten Sleman.

Dari 17 kecamatan di kabupaten Sleman, Depok merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, terdapat tiga desa di kecamatan Depok, Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwo, menurut

data BPS Desa Condongcatu menduduki posisi pertama dengan angka kelahiran rata-rata tertinggi di kecamatan Depok dengan rentang 2013 – 2017, dari data tersebut didapatkan bahwa Desa Condongcatu merupakan desa yang memiliki potensi kebutuhan ruang publik yang lebih tinggi dibanding dua desa lainnya.

Gambar 1. 4
Banyaknya kelahiran rata-rata per Desa di Kecamatan Depok



Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman*

Selain angka kelahiran yang tinggi desa Condongcatu merupakan desa terpadat di Kecamatan Depok, pada tahun 2017 banyaknya penduduk berdasarkan kelompok umur, 67.044 jiwa dari jumlah tersebut 17.938 merupakan kelompok usia anak-anak dengan jumlah lembaga pendidikan SLB 4, TK 18, SD 16, SMP 3, SMK 3, banyaknya kelompok usia dan lembaga pendidikan memproyeksikan kebutuhan kapasitas ruang yang sekiranya dapat difasilitasi oleh ruang publik, berbanding terbalik dengan kebutuhan, ketersediaan ruang bermain ramah anak yang dimiliki desa Condongcatu sangat terbatas, yaitu hanya Pedukuhan Ramah Anak yang diusulkan oleh yayasan samin tahun 2018, sehingga kebutuhan akan ruang publik yang ramah anak di luar sekolah masih sangat diperlukan khususnya di desa Condongcatu.

1.1.2 Latar Belakang Masalah

Ruang publik adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat, baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu, (Rustam Hakim, 2012). Ruang publik merupakan bagian penting dalam perencanaan kabupaten layak anak, terdapat berbagai konsep dalam implementasinya seperti desa ramah anak, taman bermain anak, ruang publik terpadu ramah anak yang disingkat RPTRA, masing-masing konsep tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, Tahun 2018 desa Condongcatur sudah memiliki desa ramah anak yang terletak di pedukuhan Ngringin tetapi kebutuhan akan ruang publik masih sangat tinggi mengingat baru 1 pedukuhan yang menerapkan desa ramah anak , sedangkan diketahui terdapat 17 pedukuhan di desa Condongcatur, (Harianjogja.com) tak hanya itu konsep desa ramah anak juga memiliki keterbatasan, pengimplementasian 6 indikator hak anak tidak dapat sepenuhnya diterapkan di setiap pedukuhan, seperti ruang informasi layak anak dan pos konsultasi, ruang tersebut membutuhkan tenaga ahli yang tersedia secara aktif selama waktu operasional sehingga membutuhkan anggaran yang memadai untuk hadir pada setiap pedukuhan, sedangkan pemerintah Sleman lebih berfokus pada wilayah administrasi yang lebih besar seperti tingkat desa (suaramerdeka.com), menurut BPS banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin per desa di desa Condongcatur pada tahun 2017 ialah 67.044 dari jumlah tersebut 17.938 jiwa merupakan kelompok usia anak-anak sehingga konsep ruang harus dapat mengakomodasi jumlah penduduk yang ada di desa Condongcatur.

Konsep RPTRA dirasa cukup tepat dibanding konsep lainnya hal ini karena integrasi ruang publik memberikan kapasitas dan integritas akomodasi lebih baik dibanding konsep lainnya yang memiliki fungsi tunggal, dengan jumlah kapasitas pengguna potensial, dunia usaha juga dapat turut hadir dalam pemenuhan hak anak yang dijabarkan pada Permen PPPA No. 11 tahun 2011 yang berbunyi.

“ Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. ”

dengan integrasi ruang, RPTRA memiliki kemampuan memenuhi 6 indikator dari 31 KLA yang tercantum pada Permen PPPA No. 12 tahun 2011 yang implementasinya dalam bentuk pemenuhan ruang fisik seperti ruang asi, informasi dan konsultasi dalam satu wilayah kawasan.

Dalam kajian pendekatan yang akan digunakan dalam perencanaan RPTRA , melakukan tinjauan implementasi KLA yang sudah ada pada kabupaten Sleman, yaitu taman Dengung, pada tahun 2018 taman ini mendapatkan predikat ruang bermain ramah anak, setelah dilakukan kajian dengan mengacu pada kriteria ruang bermain ramah anak kementerian PPPA dalam Utami (2016) ditemukan beberapa permasalahan seperti pengolahan polusi udara dan suara yang kurang , zonasi ruang komersial dan pelayanan, tidak terang benderang, fasilitas yang berkarat, akses yang tidak inklusif dan lainnya, sebagian besar permasalahan tersebut berupa penataan, penataan yang tidak tepat dapat mengurangi pengalaman ruang (Rustam Hakim, 2012). Penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan , persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Kamus Tata Ruang, Edisi I :1997) dalam implementasinya, penataan ruang memerlukan pendekatan sebagai pedoman ataupun acuan dalam perencanaannya, Salah satu dari pendekatan dengan korelasi yang kuat adalah psikologi anak dalam definisinya psikologi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah dalam hal ini psikologi anak lebih menitik beratkan pada kelompok usia

anak, pendekatan ini membedah perkembangan anak dalam tahap-tahap yang jelas seperti menurut J. Wullur (1971) mengklasifikasikan tahap perkembangan anak menjadi lima, masa hidup tahun pertama, masa pencoba, masa kanak-kanak, masa realisme dan masa pubertas. Dari kajian tahapan-tahapan perkembangan anak tersebut terlihat jelas kebutuhan ruang yang dibutuhkan oleh ruang publik terpadu ramah anak, selain itu alasan kuat psikologi anak dipilih sebagai pendekatan melihat dari studi preseden taman dengung yang hanya berfokus kepada pertumbuhan, terlihat dari fasilitas yang tersedia hanya berdasarkan parameter tersebut, padahal selain pertumbuhan ada elemen penting lainnya yaitu perkembangan, sehingga pendekatan psikologi anak dirasa dapat memberikan pengalaman ruang lebih baik.

Karakteristik pendekatan psikologi anak menekankan pada penyediaan ruang yang mendorong aktivitas motorik dan sensori anak hal ini merupakan salah satu karakteristik utama, karena kebutuhan motorik dan sensori akan selalu tumbuh dan mengalami peningkatan pada setiap fasenya, wujud dorongan aktivitas motorik ini berupa bentuk dan penataan ruang yang menarik, ruang inklusif yang dapat diakses oleh berbagai kalangan maupun kelompok usia, wahana yang bervariasi dan menantang, selain aktivitas motorik karakteristik lainnya ialah mendukung perkembangan sosial, perkembangan sosial menjadi hal yang penting ketika anak sudah matang dalam perkembangan motorik, sensoris dan mampu mengolah rangsangan atau komunikasi dari luar, wujud dari dorongan perkembangan sosial ini berupa wahana yang mendorong keterlibatan pihak lain untuk ikut terlibat seperti jungkat jungkit, zonasi ruang yang memungkinkan anak untuk berkumpul pada suatu area yang nantinya meningkatkan intensitas pertemuan. Karakteristik lainnya mendukung perkembangan berpikir, karakteristik pengembangan ini mendukung penyediaan ruang yang dapat meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali, menghubungkan dan menyimpulkan, wujud dari karakteristik ini berupa penggunaan warna yang bervariasi pada unsur *hardscape* serta *softscape* dan lainnya, dari penjelasan tersebut diketahui bahwa

pendekatan psikologi anak mampu dalam memenuhi kriteria ruang anak lebih-lebih dapat mendukung tumbuh kembang anak lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana wujud rancangan tata ruang bangunan RPTRA Condongcatur, D.I. Yogyakarta, melalui pengolahan tata ruang dalam dan tata ruang luar yang memenuhi persyaratan ruang ramah anak dengan pendekatan psikologi anak ?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan Penekanan Studi

Mewujudkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Condongcatur sebagai ruang publik terpadu yang dapat diakses oleh berbagai kelompok usia dan inklusif, dengan kemampuan mawadahi kebutuhan ruang pemerintah, masyarakat serta dunia usaha untuk ikut dalam pemenuhan hak anak, serta dapat mengimplementasikan pendekatan psikologi anak setiap periode perkembangan pada RPTRA

1.3.2 Sasaran Penekanan Studi

Adapun sasaran yang ingin dicapai berupa :

1. Terwujudnya ruang publik yang terintegritas dalam satu kawasan wilayah efektif dan sinergis yang memiliki kemampuan akomodasi pengguna serta mitra yang bekerja sama dalam pemenuhan hak anak
2. Terwujudnya ruang publik dengan kriteria peraturan kabupaten layak anak serta dapat mengimplementasikan pendekatan psikologi anak setiap periode perkembangan pada RPTRA
3. RPTRA dapat mandiri secara ekonomi untuk merawat dan mengembangkan dirinya serta memiliki daya adaptasi
4. Berkembangnya paradigma ruang publik terpadu sebagai pusat edukasi dan rekreasi masyarakat berbagai kalangan

1.4 Lingkup Studi

1.4.1 Lingkup *Spatial*

Bagian-bagian obyek studi yang akan diolah sebagai penekanan studi adalah ruang dalam berupa ruang serbaguna, laktasi, konsultasi, perpustakaan, pengelola, pos jaga, gudang, *pantry*, toilet, PKL, dan ruang luar berupa jalur lari, jalur refleksi, jalur sepeda, panggung terbuka (*amphiteatre*), kolam bermain, lapangan olahraga, taman bermain, parkir, pergola

1.4.2 Lingkup substansial

Bagian-bagian yang akan diolah berupa ruang dalam dan ruang luar dengan pendekatan psikologi anak yang diterapkan pada area komunal, pelayanan dan komersial dengan wujud bentuk, ruang, organisasi, sirkulasi, proporsi dan skala serta prinsip atau kaidah

1.5 Metode Studi

Metode studi yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Pola Prosedural

1. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data menggunakan penalaran deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang bersifat khusus

2. Pengolahan data

Selanjutnya tahapan pengolahan data, data yang sudah dikumpulkan berupa data primer dan sekunder dikaji secara komprehensif

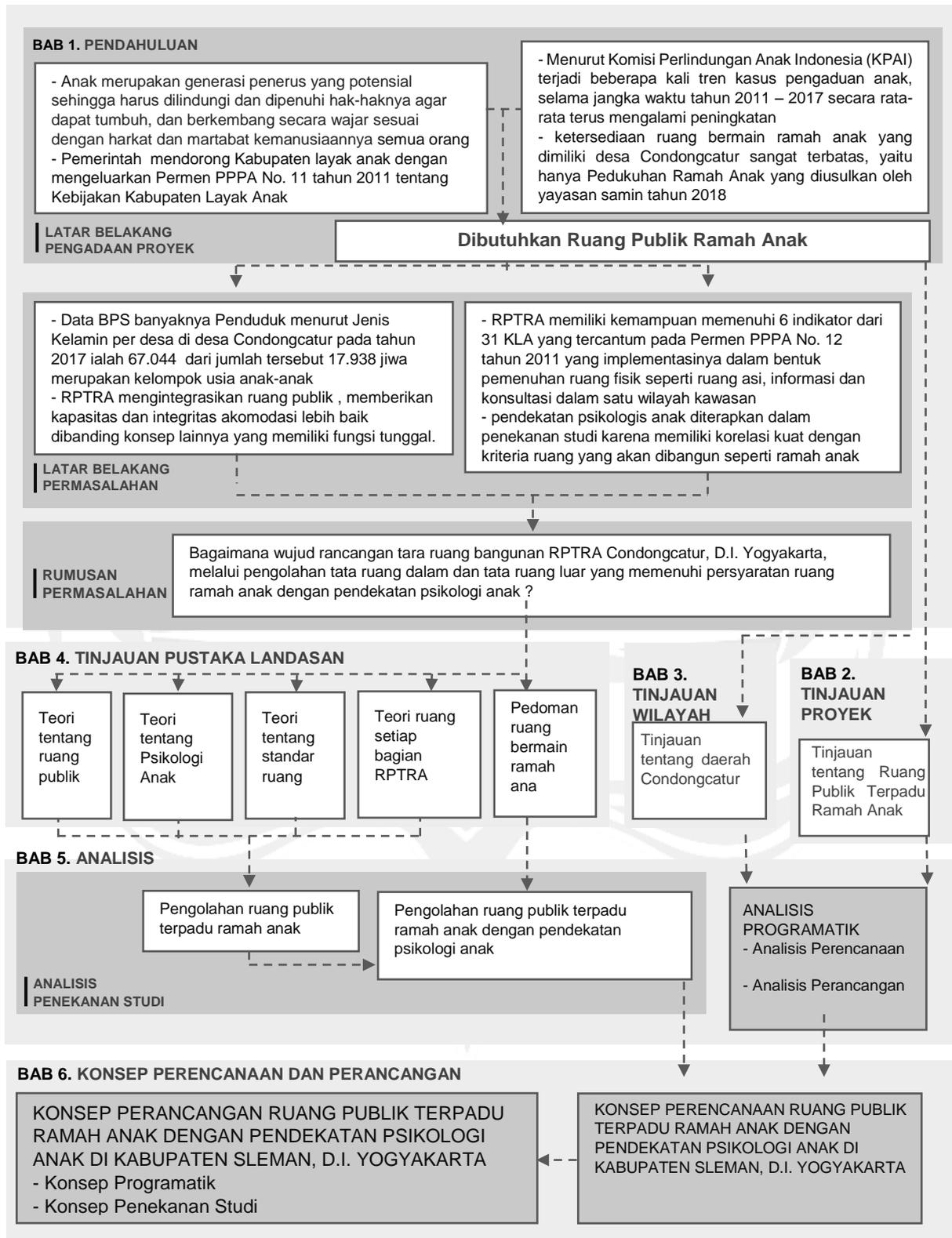
3. Penarikan kesimpulan

Setelah terdapat kajian dari pengolahan data, data di sintesiskan dengan penekanan studi sehingga didapatkan tesis baru

1.5.2 Tata Langkah

Berikut bagan tata langkah disajikan dengan skema :

Bagan 1. 1
Tata Langkah Skripsi



Bab 1. Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang pengadaan proyek, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika penulisan.

Bab 2. Tinjauan Proyek RPTRA Condongcatur

Menguraikan tentang pengertian obyek studi, fungsi dan tipologi studi, preseden serta standar-standar perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan obyek studi terkait RPTRA

Bab 3. Tinjauan Kawasan Wilayah

Menguraikan tentang kajian tapak yang dipilih mengenai aspek administratif, geografis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, sarana prasarana serta norma atau kebijakan otoritas wilayah desa Condongcatur kecamatan Depok

Bab 4. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoretikal

Menguraikan materi dan target studi yang mana berkaitan dengan batasan teoretikal materi dan target studi disesuaikan dengan penekanan studi yang diajukan

Bab 5. Analisis Perencanaan dan Perancangan

Menguraikan analisis perencanaan dan perancangan berupa garis besar rencana kongkret dan detail yang mencakup programatik serta penekanan studi

Bab 6. Konsep Perencanaan dan Perancangan

Menguraikan konsep perencanaan yang mencakup persyaratan-persyaratan perancangan, konsep lokasi dan tapak serta konsep perencanaan tapak dilanjutkan dengan konsep perancangan yang mencakup programatik dan penekanan studi